

PENGUATAN HARGA MINYAK

IEA: Subsidi Energi Harus Lebih Hati-hati

JAKARTA — Badan Energi Internasional mengimbau agar Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan subsidi energi. Apalagi, volatilitas harga bahan bakar minyak terus terjadi dengan kecenderungan naik.

Kurniawan A. Wicaksono
kurniawan.agung@bisnis.com

Direktur Eksekutif Badan Energi Nasional (*International Energy Agency/ IEA*) Fatih Birol mengatakan bahwa konsistensi dalam mempertahankan reformasi subsidi memang menjadi tantangan utama, terlebih ada faktor naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Dalam kasus seperti ini, banyak negara bisa berada di bawah tekanan untuk mengembalikan subsidi," ujarnya usai mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Senin (16/7).

Terkait dengan subsidi BBM fosil, menurutnya, kebijakan ini mendorong penggunaan energi yang tidak efisien. Kebijakan ini justru menghambat investasi di teknologi rendah karbon serta peralatan hemat energi. Emisi karbondioksida (CO₂) pun meningkat.

Pada hal, sambungnya, reformasi subsidi dapat memberikan ruang fiskal untuk mengatasi masalah lingkungan dan keamanan energi. Reformasi subsidi ini juga diperkirakan mampu mendorong transisi energi, yang pada gilirannya menyentuh efisiensi dan energi terbarukan.

IEA, lanjut Fatih, telah memberikan penekanan untuk keluar dari subsidi bahan bakar fosil selama lebih dari satu dekade dalam proyeksi energi dunia (*world energy outlook/WEO*). Nilai subsidi secara global diperkirakan turun dari US\$500 miliar pada 2012 menjadi US\$270 miliar pada 2016.

Penurunan tersebut, sambungnya, didorong oleh lebih rendahnya harga minyak internasional. Selain itu, kondisi itu juga

► Pemerintah sedang men-
kaji berbagai instrumen
untuk menentukan kebijakan
energi.

dipengaruhi oleh reformasi yang sedang berjalan di banyak negara berkembang di dunia.

Harga minyak yang tinggi pada gilirannya menekan konsumen. Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil harus dipastikan sesuai dengan target. Artinya, bantuan ditargetkan pada kelompok rentan sembari tetap menjalankan reformasi subsidi dengan komunikasi yang efektif.

"Subsidi itu inefisien dalam sistem ekonomi dan energi, tetapi dalam satu waktu berguna untuk melindungi masyarakat yang paling miskin dalam populasi. Makanya, kebijakan target subsidi perlu didesain kasus per kasus," jelasnya.

Kenaikan harga minyak justru direspons pemerintah dengan rencana penambahan subsidi Solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter dengan salah satu alasannya penajagan daya beli masyarakat. Walaupun demikian, tidak ada perubahan APBN 2018.

Selain itu, pemerintah merevisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga BBM. Dalam regulasi terbaru, BBM jenis Premium masuk dalam penugasan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Padahal, secara regulasi sebelumnya, penugasan itu hanya berlaku untuk luar Jawa, Madura, dan Bali.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, pemerintah menjamin

penyediaan seluruh jenis BBM di seluruh Tanah Air. Setelah Lebaran berakhir, pemerintah mengevaluasi penyediaan BBM. "Sudah tugas kami, pemerintah, memberikan pelayanan publik secara maksimal. Namun, pemerintah akan mengevaluasi penyediaan BBM, khususnya Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tuturnya.

SUBSIDI GAS

Untuk subsidi gas bumi, saat ini pemerintah bersama dengan pihak terkait tengah mengkaji skema penyaluran elpiji (*liquefied petroleum gas/LPG*) subsidi 3 kilogram (kg) agar tepat sasaran.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku bahwa saat ini berbagai instrumen tengah dilihat oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan energi.

PT Pertamina (Persero), sambungnya, tengah melihat opsi penggunaan kartu bantuan tunai langsung (BLT), kode batang elektronik (*barcode*), dan instrumen lain.

Djoko mengaku, pihaknya akan memfasilitasi dari sisi regulasi jika perusahaan pelat merah itu membutuhkannya. Penyaluran subsidi pada 2019 diharapkan dapat tepat sasaran. "Kalau Pertamina misalnya perlu regulasi, misalnya *barcode* untuk golongan masyarakat apa saja. Nah, kita buat regulasinya sekaligus pengawasannya."

Selain memformulasikan skema subsidi gas, pihaknya berharap agar langkah Pertamina yang meluncurkan produk LPG 3 kg nonsubsidi (*Bright Gas*) dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini justru tidak tepat menggunakan LPG subsidi.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahril Mukhtar mengatakan bahwa LPG nonsubsidi 3 kg itu tengah dalam tahap uji coba di Jakarta dan Surabaya dengan jumlah sekitar 5.000 tabung. Perseroan, sambungnya, akan mengevaluasi animo masyarakat sekitar 3 bulan—6 bulan mendatang. "Kami sasar masyarakat yang bukan target subsidi, kami belum pasang target berapa [penurunan konsumsi LPG subsidi]. Setelah uji coba, baru kami akan kalkulasi dampak perpindahannya," ucap Syahril.

Selain itu, IEA menilai bahwa negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih perlu bekerja keras dalam menarik investasi energi di wilayahnya.

Fatih Birol memaparkan, investasi energi di Asia Tenggara pada 2017 senilai US\$66 miliar atau sekitar 3,7% dari total investasi energi secara global US\$1,8 triliun.

"Dengan 10% dari populasi global, tetapi memiliki investasi kurang dari 4% dari total investasi, kawasan ini sangat membutuhkan peningkatan pengeluaran," ujarnya. ■

Asumsi Dasar Sektor Energi RAPBN 2019

Asumsi Makro	2018		2019
	APBN 2018	Realisasi Jan-Mei 2018	
Volume BBM bersubsidi (juta kl)	16,23	6,06	16,17-16,53
- Minyak tanah	0,61	0,21	0,59-0,65
- Solar	15,62	5,85	16,76-17,18
Volume LPG 3 kg (juta ton)	6,450	2,662	6,825-6,978
Subsidi tetap Solar (Rp/liter)	500	-	1.500
Subsidi Listrik (Rp triliun)	52,66	18,96	53,96-58,89

Sumber: Kementerian ESDM.

BISNIS/TRI UTOMO